

Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt) dengan Metode E-Warung di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro)

Rupiarsieh

Universitas Bojonegoro

email: arsieh_sakti@yahoo.com

Musta'ana

Universitas Bojonegoro

email: anarochim@gmail.com

Jl. Lettu Suyitno, No. 2 Kalirejo Bojonegoro

Korespondensi Penulis : arsieh_sakti@yahoo.com

Abstract.

The poverty rate in Bojonegoro Regency in 2021 has increased by 166.52 thousand people. Therefore, it is necessary to make efforts to reduce the lives of the poor towards prosperity by means of the government taking sustainable actions to facilitate access to food. Non-Cash Food Assistance is one of the programs issued by the government, but in its implementation there are still many problems that make the program not effective enough. This study aims to find out and describe how to evaluate the implementation of the non-cash food assistance program (BPNT) using the e-shop method in Bojonegoro Regency in 2021. The research methodology uses a qualitative descriptive research method with several informants as research subjects. Data obtained by interview, observation and documentation techniques. Furthermore, the data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the Evaluation of the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) using the E-warung Method in Bojonegoro Regency in 2021 has not run optimally and has not been fully effective even though several indicators have been fulfilled quite well, such as the benefits obtained by several informants. However, there are still a number of indicators that have not been fulfilled sufficiently to hinder the success of the Evaluation of the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) using the E-warung Method in Bojonegoro Regency in 2021, namely inaccuracy in targeting aid recipients, inaccuracy in the quality of food ingredients, inaccuracy in the delivery of assistance, shortage of E-warung agents in areas that are quite far from other sub-district agents. Based on the results of the research, the researcher gave advice to the Bojonegoro Regency Social Service in the form of the need to monitor and evaluate the process of implementing assistance, and to increase the number of E-warung in various sub-districts in Bojonegoro.

Keywords: Program Implementation Evaluation, BPNT, Poverty.

Abstrak.

Angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 166,52 ribu jiwa, oleh karena itu perlu diupayakan pengurangan hidup masyarakat miskin menuju sejahtera dengan cara pemerintah mengambil tindakan berkelanjutan untuk memudahkan akses pangan. Bantuan Pangan Non Tunai adalah salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan yang membuat program belum cukup efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana evaluasi pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) dengan metode e-warung di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021. Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan beberapa informan sebagai subjek penelitian. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan Metode E-warung di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 belum berjalan

Received April 23, 2023; Revised Mei 25, 2023; Accepted Juni 16, 2023

* Rupiarsieh, arsieh_sakti@yahoo.com

dengan optimal dan belum sepenuhnya efektif meskipun beberapa indikator telah terpenuhi cukup baik, seperti manfaat yang diperoleh oleh beberapa informan. Namun, masih ada beberapa indikator yang belum cukup terpenuhi sehingga menghambat keberhasilan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan Metode E-warung di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021, yaitu Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, Ketidaktepatan kualitas bahan pangan, Ketidaktepatan waktu penyampaian bantuan, kekurangan Agen E-warung di wilayah yang cukup jauh dengan Agen kecamatan lain. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran kepada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro berupa perlunya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan bantuan, dan meningkatkan jumlah E-warung di berbagai Kecamatan di Bojonegoro.

Kata Kunci : Evaluasi Pelaksanaan Program, BPNT, Kemiskinan.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan. Kemiskinan sangat berpengaruh dan berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, kemiskinan sudah menjadimasalah global dimana setiap negara memiliki satu wilayah anggota kemasyarakatan yang berada dibawah garis kemiskinan. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar dibanyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Negara-Negara di Dunia, khusus nya di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa timur pada tahun 2019 penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro berjumlah 154,64 ribu jiwa, lalu pada Tahun 2020 berjumlah 161,10 ribu jiwa, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu berada di angka 166,52 ribu jiwa. .

Kemiskinan seperti diungkapkan oleh Suparlan (1994). Dinyatakan sebagai suatu keadaan kekurangan harta atau benda berharga yang dideritaoleh seseorang atau sekelompok orang. Akibat kekurangan harta atau bendaberharga maka seseorang atau sekelompok orang itu merasa kurang mampu membiayai kebutuhan-kebutuhan hidupnya sebagaimana layaknya. Kekurang mampuan tersebut mungkin hanya pada tingkat kebutuhan- kebutuhan budaya (adat, upacara-upacara, moral dan etika), atau padatingkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial (pendidikan, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan sesama) atau pada tingkatpemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar (makan-minum, berpakaian, bertempat tinggal atau rumah, kesehatan dan sebagainya).

Kemiskinan dan ketimpangan pangan hingga kini di Indonesia adalah suatu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dari masa ke masa dan perlu untuk segera dituntaskan. Ketimpangan pangan dapat memberikan dampak buruk bagi kondisi kesejahteraan masyarakat,

hal demikian dikarenakan ketersediaan pangan yang tidak untuk dikonsumsi dan kurang berkualitas, sehingga dapat menurunkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Persoalan pangan adalah permasalahan yang kompleks dan sangat memerlukan perhatian pemerintah sehingga dibutuhkan penanganan program secara terpadu dan berkelanjutan (Rachman, 2018).

Oleh sebab itu, perlu diupayakan pengurangan taraf hidup masyarakat miskin menuju sejahtera dengan cara pemerintah mengambil tindakan dengan mengeluarkan beberapa program untuk memudahkan akses pangan serta memenuhi nutrisi pangan dalam memenuhi kehidupan yang lebih sehat dan aktif (Eggie, R.M, 2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, hingga pada saat ini banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya di Kabupaten Bojonegoro. salah satu program untuk mengatasi masalah kemiskinan yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bertujuan mentransformasi bantuan menjadi non tunai dengan cara melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan secara langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Program Bantuan Non Tunai (BPNT) adalah salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai tindak berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan di kabupaten Bojonegoro. Bantuan Pangan Non Tunai merupakan Program kelanjutan dari program Raskin yang berganti nama jadi Rastra (Beras Sejahtera) pada tahun 2018, yang terdapat pada peraturan Menteri social Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, Program ini sama dengan Raskin hanya saja dibedakan oleh penyebutannya saja, namun pada tahun 2019 Kementrian social optimis Rastra (beras sejahtera) diganti nama jadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non Tunai yaitu bantuan berupa barang yang diberikan kepada seseorang atau keluarga yang tidak mampu selama setahun dibagikan 14 kali. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bojonegoro telah mendapatkan dan terdaftar menjadi Masyarakat Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non-Tunai, tersebar di 28 Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah masyarakat/seseorang yang telah memenuhi kriteria indikator bagi penerima bantuan sosial, dan juga yang mempunyai hak dalam mendapatkan pemenuhan kebutuhan pokok yang bisa didapatkan melalui agen/e-warung dengan menggunakan kartu Elektronik yang telah bekerjasama dengan bank penyalur. Pada Tahun 2020, jumlah KPM di Kabupaten Bojonegoro yang tersebar di 28 Kecamatan sebanyak 7.613 KPM dan pada Tahun 2021 mengalami penurunan berada di angka 6.723 KPM dikarenakan adanya beberapa KPM yang mendapatkan bantuan ganda sehingga KPM tersebut

harus di keluarkan dari daftar penerima bantuan pangan non tunai.

Tabel 1
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah penerima manfaat
1	Kecamatan Kedewan	65 KPM
2	Kecamatan Dander	447 KPM
3	Kecamatan Kasiman	163 KPM
4	Kecamatan Ngraho	170 KPM
5	Kecamatan Purwosari	179 KPM
6	Kecamatan Tambakrejo	485 KPM
7	Kecamatan Temayang	86 KPM
8	Kecamatan Trucuk	165 KPM
9	Kecamatan Kapas	376 KPM
10	Kecamatan Bubulan	146 KPM
11	Kecamatan Kedungadem	481 KPM
12	Kecamatan Malo	184 KPM
13	Kecamatan Ngambon	27 KPM
14	Kecamatan Sugih waras	280 KPM
15	Kecamatan Baureno	483 KPM
16	Kecamatan Sumberrejo	511 KPM
17	Kecamatan Margomulyo	98 KPM
18	Kecamatan Kalitidu	227 KPM
19	Kecamatan Padangan	118 KPM
20	Kecamatan Sukosewu	314 KPM
21	Kecamatan Gayam	184 KPM
22	Kecamatan Gondang	266 KPM
23	Kecamatan Balen	319 KPM
24	Kecamatan Bojonegoro	138 KPM
25	Kecamatan Ngasem	329 KPM
26	Kecamatan Kanor	417 KPM
27	Kecamatan Sekar	258 KPM
28	Kecamatan Kepoh baru	744 KPM
	JUMLAH	7.613 KPM

Tabel 2
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Jumlah penerima manfaat
1	Kecamatan Kedewan	137 KPM
2	Kecamatan Dander	414 KPM
3	Kecamatan Kasiman	224 KPM
4	Kecamatan Ngraho	177 KPM
5	Kecamatan Purwosari	122 KPM
6	Kecamatan Tambakrejo	401 KPM
7	Kecamatan Temayang	136 KPM
8	Kecamatan Trucuk	185 KPM
9	Kecamatan Kapas	336 KPM
10	Kecamatan Bubulan	148 KPM
11	Kecamatan Kedungadem	438 KPM
12	Kecamatan Malo	186 KPM

13	Kecamatan Ngambon	100 KPM
14	Kecamatan Sugih waras	259 KPM
15	Kecamatan Baureno	454 KPM
16	Kecamatan Sumberrejo	511 KPM
17	Kecamatan Margomulyo	64 KPM
18	Kecamatan Kalitidu	121 KPM
19	Kecamatan Padangan	196 KPM
20	Kecamatan Sukosewu	347 KPM
21	Kecamatan Gayam	155 KPM
22	Kecamatan Gondang	59 KPM
23	Kecamatan Balen	277 KPM
24	Kecamatan Bojonegoro	134 KPM
25	Kecamatan Ngasem	231 KPM
26	Kecamatan Kanor	325 KPM
27	Kecamatan Sekar	290 KPM
28	Kecamatan Kepoh baru	296 KPM
JUMLAH		6.723 KPM

Sumber : Dinas Sosial

Tujuan Program Bantuan Pangan secara non tunai daerah ini selain meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, juga untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, serta memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin, dan mengefektifkan anggaran. Selain itu, penyaluran bantuan pangan secara non tunai juga diharapkan dapat berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat. Namun sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri sosial No. 25 Tahun 2016 bahwa yang harus mendapatkan bantuan pangan non-tunai yang disebut sebagai penerima keluarga manfaat adalah dengan kondisi sosial ekonomi dibawah 25% namun realitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai masih banyak yang diterima oleh masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi diatas 25% dengan begitu pelaksanaan program tidak tepat sasaran.

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) akan menggantikan penyaluran beras secara langsung dan ditebus dengan sejumlah uang dengan program BPNT yang akan menyalurkan bantuan pangan dalam kartu elektronik yang berisi uang yang telah diberikan oleh pemerintah, dengan uang tersebut masyarakat penerima BPNT akan dibebaskan untuk membeli kebutuhan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan Pangan Non-Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada masyarakat penerima manfaat (Alive, Johnny, Stefvanus 2020). Program BPNT awalnya disalurkan ke beberapa kota/daerah terpilih di Indonesia yang dinilai memiliki kesiapan untuk menjalankan program BPNT ini, kesiapan yang dimaksudkan adalah dari segi akses dan fasilitas untuk melaksanakan program

BPNT. Sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Presiden bahwa dalam penyaluran BPNT yang akan dilaksanakan secara Non-tunai menggunakan sistem perbankan sehingga memerlukan akses jaringan yang mendukung. Pencairan dana bantuan sosial dapat dilakukan di Elektronik Warung (E-warung) atau agen yang telah bekerja sama dengan pemerintah, E-warung atau agen akan menyediakan kebutuhan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat penerima manfaat dengan kualitas sesuai standar yang berlaku.

Elektronik Warung Gotong Royong yang disebut E-warung adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama bank penyalur. Penggunaan E-warung dapat dilakukan dengan menggunakan kartu elektronik KPM yang telah diberikan oleh pihak bank penyalur untuk memenuhi kebutuhan pokok.

E-warung di Kabupaten Bojonegoro sudah tersebar di 26 kecamatan dan 2 Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang belum ada Agen E-warung adalah Kecamatan Kedewan dan Kecamatan Ngambon. KPM yang berasal dari 2 kecamatan tersebut saat penyaluran bantuan dapat melakukan transaksi di agen kecamatan lain sesuai arahan dari pendamping program, agar KPM tetap dapat menerima bantuan sesuai waktunya.

Besaran BPNT pada awal dikeluarkan program BPNT adalah Rp. 110.000/KPM/bulan yang kemudian pada awal tahun 2020 besaran uang dalam kartu elektronik ditambahkan uang sejumlah Rp. 40.000/KPM sehingga total uang elektronik dalam setiap kartu yang akan diberikan kepada setiap KPM sejumlah seratus lima puluh ribu rupiah pada tiap-tiap KPM yang disalurkan secara non tunai yang bisa untuk ditukarkan dengan bahan-bahan pokok rumah tangga. Selain itu bantuan yang diberikan pemerintah dalam program BPNT tidak dapat diakumulasi, apabila penerima bantuan tidak dapat membelanjakan pada e-warung maka bulan berikutnya bantuan dianggap hangus atau tidak dapat diambil lagi. Selain itu, dalam penyaluran bantuan pangan diharapkan mewujudkan prinsip 6T dalam penyaluran bantuan, prinsip 6T yang dimaksud adalah Tepat sasaran, Tepat waktu, Tepat jumlah (artinya tidak boleh ada pengurangan sedikitpun hak untuk KPM), Tepat kualitas, Tepat harga, dan Tepat administrasi. Agar bantuan Pangan Non Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran, dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Melalui Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat serta membantu masyarakat yang tergolong dalam perekonomian yang lemah, akan tetapi selama berjalan nya BPNT dilingkungan masyarakat, penyaluran bantuan ini masih dikatakan kurang efisien, dikarenakan belum tepat sasaran, dikarenakan beberapa dari penerima BPNT sudah tidak termasuk dalam penerimaan indikator bantuan, disebabkan terjadinya pergantian data yang bergantung pada data daerah sehingga menghambat proses dari data pusat, dikarenakan adanya bahan pokok yang tidak tepat kualitas sehingga diperlukan pengevaluasian, sebagai tolak ukur dari pencapaian keberhasilan jalannya suatu program yang dilaksanakan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas social Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini berfokus pada sasaran sosialisas pemilihan dan metode sosialisasi meliputi 1) evaluasi proses 2) evaluasi manfaat, 3) evaluasi dampak. Pengambilan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, dalam proses penelitian terinventarisir sumber data primer sebanyak 25 informan dari Dinas Sosial, masyarakat penerima bantuan, Agen/Penyalur E-Warung. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam penelitian ini metode analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif non statistik.

HASIL PEMBAHASAN

Pembahasan

Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai dengan Metode E-warung dengan mengacu pada 3 indikator dari teori evaluasi dalam evaluasi program, sebagai berikut:

1. Evaluasi Proses

Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai harus di dasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara pihak Dinas Sosial dengan Masyarakat Keluarga Penerima Manfaat yang harus di daftarkan sebagai salah satu sumber penerima dalam program BPNT. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus dengan Berpedoman pada juknis pelaksanaan BPNT Tahun 2021.

a) Mengusulkan Verifikasi dan Validasi NIK

Pengusulan verifikasi dilakukan untuk bertujuan memastikan data calon penerima bantuan program benar adanya dan validasi dilakukan untuk pengujian data calon penerima bantuan agar data dapat di sahkan dan bisa melakukan proses selanjutnya. Dasar hukum pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut data usulan verifikasi dan validasi data pada Tahun 2021 sejumlah 8.482 KPM, setelah di verifikasi dan divalidasi jumlah KPM yang valid berjumlah 6.723 KPM dari 8.482 KPM yang tersebar di 28 kecamatan, valid dan resmi terdaftar menjadi Keluarga Penerima Manfaat BPNT. Jumlah sisa yang gagal tervalid data berjumlah 1.759 orang dikarenakan data belum terdaftar di DTKS dan ada yang sudah terdaftar menjadi KPM KPH.

b). Pemadanan data penerima Bantuan Pangan Non Tunai

Pemadanan data dilakukan setelah proses verifikasi dan validasi data telah rampung dilakukan, pemadanan atau pencocokan data dilakukan dengan cara melakukan pencocokan antara data calon penerima dengan data DTKS yang ada di Dinas.

c). Menyampaikan surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM

Proses penyampaian penerbitan SPP (Surat Perintah Pencairan Dana) dan SPM (Surat Perintah Membayar) BPNT disampaikan kepada pihak desa agar masyarakat KPM bisa mendapatkan pencairan dana dari program BPNT.

d). Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai kepada Masyarakat

Proses Penyaluran BPNT kepada masyarakat dilakukan 4 kali tahapan setiap 3 bulan sekali dan dilaksanakan melalui Agen-agen terdekat.

e). Pendaftaran menjadi Agen E-warung

Proses pendaftaran menjadi Agen yaitu calon agen mengajukan diri disertai persyaratan ke Dinas Sosial dan lalu Dinas Sosial menetapkan SK Agen BPNT, untuk selanjutnya dikirim ke Bank Jatim Bojonegoro untuk dilakukan seleksi kelayakan agen.

2. Evaluasi Manfaat

- a). Meningkatkan ketahanan pangan, perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
Ketahanan pangan, perlindungan sosial serta penanggulangan kemiskinan adalah sebuah kepentingan sebuah organisasi pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yang masuk dalam kriteria kurang mampu.

Tabel 3
Realisasi Bahan Pangan Pokok

Tahap 1-2-3-4	Beras (Kg)	Telur (Kg)	Jumlah KPM
Januari, Februari, Maret	30 Kg/KPM	3 Kg/KPM	6.723 KPM
April, Mei, Juni	30 Kg/KPM	3 Kg/KPM	
Juli, Agustus, September	30 Kg/KPM	3 Kg/KPM	
Oktober, November, Desember	30 Kg/KPM	3 Kg/KPM	

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro

Menurut data diatas dapat diketahui bahwa jumlah kilogram Beras dan Telur yang diterima oleh setiap KPM adalah 30 Kg Beras dan 3 Kg Telur setiap tahapan yaitu setiap 3 Bulan, jadi per 1 Bulan penyaluran 1 KPM mendapatkan 10 Kg Beras dan 1 Kg Telur yang mana sudah terbagi rata untuk masing-masing KPM. Jika ada beras atau Telur yang berkualitas kurang bagus atau Jelek bisa dapat dikembalikan ke masing-masing Agen dan di gantidengan yang baru.

b). Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan kepada KPM melalui sistem perbankan yang dapat digunakan untuk mendapatkan bahan pangan pokok seperti Beras dan Telur yang telah disediakan oleh Agen E-warung. KPM dapat menerima Beras dan Telur di Agen E-warung dengan memberikan Kartu Elektronik yang telah terisi saldo setiap 3 Bulan sekali. Kartu Bank atau Kartu Elektronik yang dipakai oleh KPM adalah kasrtu ATM khusus KPM BPNT yang disediakan oleh Dinas serta Bank Jatim. Bank jatim akan mengisi saldo setiap kartu di setiap bulan penyaluran BPNT.

c).Efisiensi dan efektifitas penyaluran Bansos.

Efisiensi dan keefektifitasan dalam penyaluran Bansos sangat dibutuhkan agar dapat membantu tersalurkannya bantuan secara menyeluruh dan bantuan tersalurkan dengan tepat sasaran kepada KPM yang seharusnya.

Penyaluran Bansos BPNT biasanya dilakukan di kantor kelurahan Kecamatan setempat agar masing-masing KPM dapat jangkauan terdekat untuk mendapatkan bantuan.

3. Evaluasi Dampak

Dampak Positif Agen E-warung BPNT

Tabel 4
Dampak terealisasinya Bansos BPNT

Barang (Kg)	Tahap 1 Rp.5000/KPM	Tahap 2 Rp.5000/KPM	Tahap 3 Rp.5000/KPM	Tahap 4 Rp.5000/KPM
Beras	☐	☐	☐	☐
Telur	☐	☐	☐	☐

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro

Dari data diatas dapat disimpulkan dengan adanya pembelian Beras dan Telur oleh KPM membantu keuntungan pendapatan dari hasil penyaluran bansos di setiap kecamatan. Agen mendapatkan keuntungan Rp.5000 per KPM disetiap pembelian Beras dan Telur.

a). Dampak Positif Penerima Program BPNT

Tabel 5
Dampak terealisasinya Bansos BPNT

Barang (Kg)	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
Beras	Rp.450.000	Rp.450.000	Rp.450.000	Rp.450.000
Telur	Rp.450.000	Rp.450.000	Rp.450.000	Rp.450.000

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro

Menurut data tabel diatas dengan adanya Beras dan Telur membantu Masyarakat KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok untuk kehidupan sehari-hari, Kartu Elektronik yang berisi saldo dapat dibelikan bahan pokok yang dibutuhkan KPM. Penyaluran Bansos disalurkan setiap 3 bulan sekali dan penyaluran bansos dilaksanakan di Kecamatan masing-masing.

b).Dampak Negatif Penerima Bantuan

Dampak negatif adalah dampak yang kurang baik yang diterima oleh penerima bantuan sosial. Baik itu dampak negatif seperti kartu elektronik yang tiba-tiba rusak disaat penyaluran, saldo yang belum terisi, atau jarak pembagian penyaluran bansos terlalu jauh dari rumah masyarakat KPM.

c).Dampak negatif Agen E-warung Program BPNT

Dampak negatif yang terjadi pada agen merupakan dampak yang menimbulkan kerugian pada agen, kerugian yang tidak bisa diatasi sepenuhnya karena kerugian tersebut menyangkut akibat dari kenaikan harga bahan pokok yang berangsur semakin tinggi, bahkan dari kerusakan kartu elektronik serta nomor nik kpm yang tidak sesuai dengan data yang didata. Dampak negatif ini belum bisa teratasi sepenuhnya dikarenakan kesalahan atau kerusakan harus di proses terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi kembali agar data dapat sesuai dengan yang ada di agen tersebut.

d). Dampak kurangnya SDM Agen E-warung

Tabel 6
Kecamatan tanpa Agen E-warung

No	Nama Kecamatan	Jumlah KPM	Jumlah Agen
1	Kecamatan Kedewan	277	-
2	Kecamatan Ngambon	100	-

Menurut data tabel diatas jumlah Agen E-warung belum mencukupi jumlah KPM yang tersebar di 28 Kecamatan, dari 28 Kecamatan tersisa 2 Kecamatan yang belum terpenuhi Agen E-warung. 2 Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Kedewan dan Kecamatan Ngambon yang masing-masing memiliki jumlah KPM sebanyak 277 dan 100 KPM.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai dengan metode E-warung Tahun 2021 di Kabupaten Bojonegoro dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan indikator proses, Bantuan Pangan Non Tunai telah melaksanakan program sesuai dengan pedoman/Juknis BPNT Tahun 2021, namun dalam pelaksanaan proses masih kurang nya sosialisasi terhadap pelaksanaan BPNT kepada masyarakat calon penerima

- sehingga masih terdapat Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.
2. Berdasarkan indikator Manfaat, dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai ini menjadi pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat miskin dan Agen E-warung. Akan tetapi keberhasilan pada manfaat yang dirasakan masih kurang karena masih adanya manfaat yang belum cukup baik untuk diwujudkan yaitu penanggulangan kemiskinan
 3. Berdasarkan indikator dampak, dalam jangka panjang ini bisa mengubah kesejahteraan masyarakat miskin dengan adanya pengurangan taraf hidup masyarakat miskin, dengan program BPNT. Namun, masih menjadi masalah untuk dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat KPM atau Agen, misalnya kenaikan harga dan kekuarangan Agen E-warung di dua kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Arikunto, S dan Cepi, Abdul Jabar. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan; Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan* Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Usman, Husaini dan Setiady, Purnomo. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006.
- Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. 2012. Jakarta : Salemba Empat.
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Husein Umar. (2005), *Metode Penelitian Untuk Tesis dan Bisnis*, Jakarta : Grafindo Persada
- Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Diva Press, 2010
- Suparlan, Dr. Parsudi : *Kemiskinan Di Perkotaan, Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*; 1984. Jakarta. Penerbit Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia.
- Hayati, Mardiyah. *Desain Pembelajaran*, Yayasan Pustaka Riau, Pekanbaru. 2009:51
- Suchman dalam Arikunto, Jabar, dan Abdul. 2010:56. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Stufflebeam dalam Arikunto. 2004;1-2. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Wirawan. 2012. *Evaluasi : Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Depok : Raja Grafindo Persada
- Umar, Husein. 2005. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*, Penerbit : Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik : formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta : Media Elex Komputindo
- Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung :PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung : Alfabeta Black,
- James, Champion, Dean. 1999. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Jakarta : Refika Aditama
- Aan Komariah dan Djaman Satori. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Nasution. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Tarsito
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya
- AG. Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Jurnal-jurnal

- Mulyadi, Suprayekti, Fathia Fairuza. *Evaluasi Program*. Jakarta : LembagaPengembangan UNJ, 2015.
- Maghfira, E.R. (2020) *Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Elektronik Melalui Kartu Kombo Di Kabupaten Bantaeng*
- Laurentcia, S. Yusran, R. Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. *Journal of civic Education* (2021)
- Garis, R.R. Desfirani, L. 2021, *Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan NonTunai dalam penanganan dampak Covid-19*. Musamus *Journal Of Public Administrasi* 4 (1), 47-56
- Arti kata – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, (<https://kbbi.web.id/evaluasi.html>) diakses : 10 Februari 2022
- Choesni. T.A. 2017. *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*
- Rachman. B. Agustian. A. Wahyudi. 2018. *Eefektifitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*. Analisis kebijakan Pertanian, Vol. 16 No. 1

Internet

- Gunawan, Indra. 2021. Penerima BPNT Bertambah, Kini 83.633 Orang. Radar Bojonegoro, radarbojonegoro-jawapos-com.cdn.ampproject.org
- Penyaluran Bansos BPNT PeriodeMaret Tertunda. 17Maret 2021. Bojonegorokab.go.id.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang *Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2019 tentang *BantuanPangan Non Tunai yaitu bantuan berupa barang yang diberikan kepada seseorangatau keluarga yang tidak mampu selama setahun dibagikan 14 kali*

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang *BantuanPengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang *Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai*

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M- DAG/PER/2017 tentang *Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras*

Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)

Vol.2, No. 2 Juni 2023

e-ISSN: 2962-262X; p-ISSN: 2962-2611, Ha 16-29

Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)

Vol.2, No. 2 Juni 2023

e-ISSN: 2962-262X; p-ISSN: 2962-2611, Ha 16-29

Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)

Vol.2, No. 2 Juni 2023

e-ISSN: 2962-262X; p-ISSN: 2962-2611, Ha 16-29

*Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non- Tunai (Bpnt) dengan Metode E-Warung
di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro)*